

PERUBAHAN RENSTRA



**DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA BLITAR**

RENCANA STRATEGIS

Alamat:

Jl. Kenari No.66, Plosokerep, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66134
Telepon: (0342) 810548

<http://dispendukcapil.blitarkota.go.id>

2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar telah selesai menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja bidang administrasi kependudukan . Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kota yakni RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar .

Perubahan Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, isu isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Perubahan Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pelaksanaan urusan administrasi kependudukan di tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Blitar , 17 Mei 2023

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**



Drs. HARI WAHYUDI, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 196707171993031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	i
1.1 LATAR BELAKANG.....	1061
1.2 LANDASAN HUKUM	1063
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	1067
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	1068
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	1069
2.1 Tugas Dan Fungsi Dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah....	1070
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	1072
2.2.1. Sumber Daya Manusia	1072
2.2.2 Sarana dan Prasarana	1074
2.3. Kinerja Pelayanan	1075
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	1087
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	1089
3.1. 1identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	1090
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	1091
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	1094
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1096
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	1098
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	1100
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	1100
4.1.1 Tujuan	1100
4.1.2 Sasaran.	1100
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1103
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1143
BAB VIII PENUTUP	1148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rncangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disusun sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan perubahan Perwali Tupoksi dan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ dimana dengan terbbitnya aturan baru tersebut menyebabkan Perangkat Daerah melakukan perubahan di level kegiatan dan sub. Kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target dan substansinya.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 – 2026 melalui beberapa tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra ;
- b. penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra ;
- c. penyusunan rancangan Perubahan Renstra;
- d. perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra;
- e. Penetapan Perubahan Renstra

Dokumen Perubahan Renstra mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah , sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 bahwa rancangan awal RPJMD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah. Maka Rancangan Awal RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 .

Adapun keterkaitan dokumen Perubahan Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar , yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Blitar sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kependudukan, Tugas Dan Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2022-2026 maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
- b. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- c. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- f. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - q. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Ferifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- z. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi Dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Terkait Dak Tahun Anggaran 2022, Dbh Dr Tahun Anggaran 2022, Dbh Cht Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek Dan Kemenkes.
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- bb. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
- cc. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
- dd. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)

- ee. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- ff. Peraturan Wali Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah :

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Perubahan RPJMD Kota Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di bidang urusan administrasi kependudukan
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang administrasi kependudukan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar setiap tahunnya

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan dasar yaitu ketentuan – ketentuan yang melandasi , merupakan langkah untuk membatasi pembahasan dan sistematik penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Berisi Struktur Organisasi tentang kondisi riil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar meliputi :

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumber Daya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten /Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
2. Strategi dan Kebijakan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perngakt daerah pada lima tahun mendatang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Dan Fungsi Dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Urusan Administrasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan , Sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya .

1. Keadaan Pegawai , sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	Pasca Sarjana (S-2)	2 orang	- orang
2	Sarjana (S-1)	4 orang	9 orang
3	Diploma (D-3)	2 orang	2 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7 orang	1 orang
5	Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)	0 orang	0 orang
	Jumlah	13 orang	12 Orang

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan /Ruang	Jumlah	
		L	P
1	IV / b	1 orang	- orang
3	IV / a	1 orang	1 orang
4	III / d	3 orang	4 orang
5	III / c	- orang	- orang
6	III / b	- orang	4 orang
7	III / a	2 orang	2 orang
8	II / d	6 orang	1 orang

No	Golongan /Ruang	Jumlah	
		L	P
9	II / c	2 orang	- orang
10	II / b	1 orang	- orang
11	II /a	- orang	- orang
12	I/ d	- orang	- orang
13	Kontrak	- orang	- orang
	Jumlah	15 orang	12 orang

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	
		L	P
1	Struktural	5 orang	5 Orang
2	Non Struktural	10 orang	7 Orang
	Jumlah	13 orang	12 Orang

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah	
		L	P
a.	Diklat Kepemimpinan		
	1) Diklat PIM II	- orang	- orang
	2) Diklat PIM Tk. III	2 orang	1 orang
	3) Diklat PIM Tk. IV	2 orang	5 orang
	4) SPAMA	- orang	
	5) ADUMLA	- orang	
	6) ADUM	- orang	

Sumber: Dispendukcapil, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar telah dilengkapi sarana dan prasarana meskipun belum memadai yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsinya .Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini , seperti tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah		
2.	Bangunan gedung 2 lantai	9 ruangan	1 ruang kepala
			1 ruang Sekretaris
			3 ruang Kabid
			1 ruang arsip
			1 ruang pertemuan
			1 ruang pelayanan
			1 ruang server
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3 (tiga) buah	- Kijang warna biru AG. 421 PP
			- Kijang Innova warna hitam AG 584 PP
			- Suzuki Carry AG 375 PP
4.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	6 (Enam) buah	- Suzuki AG 2652 PP
			- Suzuki AG 2653 PP
			- Honda Legenda No. Pol
			AG. 9825 HA Th. 2006
			- Honda Legenda No. Pol.
			AG.9849HB Th. 2006
			- Honda Legenda No.Pol.AG 9807 HB
			- Honda Legenda No.Pol.AG 9863 HB
5.	Meja 1 biro	6 (enam) buah	Untuk eselon II dan III (kayu)
6.	Meja ½ biro	20 buah	Kayu
7.	Kursi putar	5 (lima) buah	Besi
8.	Kursi tamu	1 (satu) set	Besi spon (ruang kepala)
9.	Kipas angin	3 (tiga) buah	Besi
10.	Pesawat telepon	2 (dua) buah	Merk Tens plastic
11.	Brankas	1 (satu) buah	Besi

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
12.	Almari panjang	3 (tiga) buah	Kayu
13.	Jam dinding	3 (tiga) buah	Plastik
14.	Tape recorder	1 (satu) buah	Merk Compo Politron
15.	Mesin ketik	4 (empat) buah	- Olympia 1 buah
			- TA. Royal 1 buah
			- Gandaran 2 buah
16.	Almari sedang	3 (tiga) buah	Kayu
17.	Dispenser	2 (dua) buah	Plastik
18.	Papan Struktur Organisasi	1 (satu) buah	Melamin
19.	Papan Tupooksi Dinas	1 (satu) buah	Melamin
20.	Papan Data	1 (satu) buah	Melamin
21.	Papan Pengumuman	2 (dua) buah	Melamin
22.	Komputer	5 (dua) unit	Logam
23.	TV	1 (satu) unit	Logam
24.	Filling Kabinet	8 (delapan) buah	Besi
25.	Kodak	1 (satu) buah	Rusak
26.	AC	3 (tiga) unit	Logam
27.	Warles	1 (satu) unit	Logam
28.	Almari Arsip	6 (enam) unit	Kayu
29.	Rak Arsip	10 (sepuluh) buah	Besi
30.	Kursi Kerja	28 buah	Kayu / Spon
31.	Kursi Rapat	38 buah	Kayu / Menjalin
32.	Kursi tamu panjang	1 set (4 buah)	Plastik
33.	Kursi Plastik	10 buah	Plastik
34.	Kursi Bunder Pengunjung	5 buah	Kayu
35.	Rak Piring	1 buah	Kayu
36.	Piring Besar	3 dosen	Kaca
37.	Piring Kecil	3 dosen	Kaca
38.	Gelas	3 dosen	Kaca
39.	Panci	2 buah	Aluminium
40.	Sendok	3 dosen	Stainlestell
41.	Faximile	1 buah	Logam
42.	Laptop	3 buah	Logam
43.	Server	1 unit	Logam
44.	Printer	6 buah	Logam
45.	Scaner	1 buah	Logam

Sumber: Dispendukcapil, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disamping sumber daya manusia , sarana dan prasarana juga didukung oleh dana.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indikator Tujuan																		
a.	Survey Kepuasan Masyarakat				Baik 78	Baik 79	Baik 80	Baik 81	Baik 82	Baik 79,5	Baik 78,41	Baik 82,96	Baik 83,02		101,92	99,25	103,70	102,4	
2.	Indikator sasaran																		
a.	Presentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (IKU)				87	89	-	-	-	93,68	96,05	96,70	97,02	-	107,67	107,92	-	-	-
b	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan				-	-	90	91	92	-	-	93,59	94,80	-	-	-	103,9	104,17	-
	- Persentase capaian kepemilikan KTP									95,76	98,3	98,81	99,27						
	- Persentase capaian penerbitan KK									100	100	100	100						
	- Persentase capaian penerbitan surat pindah									99	100	100	100						
	- Persentase capaian kepemilikan KIA									69	77,96	80,22	91,15						
c	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipi				-	-	90	91	92	-	-	98,85	99,25	-	-	-	109,83	109,06	-
	- Persentase capaian kepemilikan akta kelahiran (usia 0 -18 th)									86,65	92,14	94,54	97,02						
	- Persentase capaian penerbitan akta perceraian									100	100	100	100						
	- Persentase capaian penerbitan akta kematian									99	100	100	100						

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
d	Persentase data kependudukan yang valid				87	89	-	-	-	98,92	99,6	-	-	-	113,70	111,91	-	-	-
	- Jumlah data penduduk yang valid									154,714	157.148	157.014	158.349						
	- Jumlah seluruh data penduduk									156.391	157.725	157.468	158.376						
e	Persentase peningkatan validitas data kependudukan				-	-	0,12	0,12	0,12	-	-	0,09	0,27		-	-	75.00	225	-
3.	SPM Selain indikator Tujuan/ Sasaran/ IKU																		
a	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100			100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
b.	Cakupan penerbitan KTP	100			100	100	-	-	-	98,75	94	-	-	-	98,75	94	-	-	-
c.	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18	90			90	90	-	-	-	98,75	92,14	-	-	-	109,72	102,38	-	-	-
d.	Cakupan penerbitan akta kematian	70			70	70	-	-	-	100	100	-	-	-	142,86	142,86	-	-	-
4.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																		
a	Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang Mempunyai Akte kelahiran		100		100	100	100	100	100	98,75	98,3	95,42	97,02	-	98,75	98,30	95,42	97,02	-
b.	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik		100		100	100	100	100	100	98,75	92,14	96,03	99,52	-	98,75	92,14	96,03	99,52	-
c.	Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA		100		100	100	100	100	100	64,8	77,96	78,36	79,70	-	60,80	77,96	78,36	79,70	-
5.	Indikator Program																		
a.	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
	- Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan				87	89	90	91	92	90,94	91	103,9	94,80		104,5	102,2	115,4	104,1	
b	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	- Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil				87	89	90	91	92	88,14	98	109,84	99,25		101,3	110,1	122	109,06	
c	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
	- Prosentase Validitas data kependudukan				87	89	90	91	92	98	99,6	110,7	99,98		112,6	111,9	121,6	109,86	
d	Program Profile Kependudukan																		
	- Prosentase profile kependudukan Kota Blitar				100	-			100	100					100				

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Dari tabel, dapat dilihat indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :

- 1) Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (kepemilikan dokumen KK, KTP el, KIA)
- 2) Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (kepemilikan dokumen akta kelahiran , akte kematian, akte perkawinan dan akte perceraian)
- 3) Persentase data kependudukan yang valid
- 4) Persentase peningkatan validitas data kependudukan

Dari indikator kinerja tersebut sampai dengan tahun 2020 pada dasarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun untuk capaian kepemilikan KIA masih rendah yakni 79,70 % dari target 100%. Hal ini disebabkan anak usia 15 dan 16 tahun kurang berminat untuk mengurus KIA dikarenakan bagi yang usia 16 tahun sudah melakukan perekaman KTP el sehingga yang bersangkutan menunggu jadinya atau cetak KTP el.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode Renstra 2016-2020 dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran sebagaimana table berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar Tahun 2016 – 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.160.000	-	-	-	-	2.336.980	-	-	-	-	74%			-	-	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.209.200	217.000.000	238.200.000	-	-	112.514.022	195.713.377	206.217.021	-	-	55%	90%	87%	-	-	8%	35%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.387.200	12.923.400	16.500.000	-	-	18.775.200	12.923.400	16.500.000	-	-	97%	100%	100%	-	-	-8%	-6%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.278.650	15.000.000	10.781.000	-	-	22.099.650	14.904.000	10.781.000	-	-	99%	99%	100%	-	-	-30%	-30%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.336.450	3.600.000	4.000.000	-	-	3.336.450	3.600.000	4.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	-	9%	9%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.080.100	6.899.600	7.954.530	-	-	6.080.100	6.899.600	7.881.830	-	-	100%	100%	99%	-	-	14%	14%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	6.120.000	7.200.000	-	-	7.200.000	6.120.000	7.200.000	-	-	100%	100%	100%	-	-	0%	0%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.240.000	7.560.000	21.328.400	-	-	4.240.000	7.560.000	21.328.400	-	-	100%	100%	100%	-	-	124%	124%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	146.551.300	158.213.500	204.739.150	289.947.600,00	80.000.000	146.267.923	158.204.027	204.738.615	289.264.496	79.999.671	100%	100%	100%	99,8%	100%	18%	18%
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	-	-	-	58.270.400	62.956.400	-	-	-	57.232.600	61.944.850	-	-	-	98,2%	98%	8%	8%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	-	-	-	76.400.000	116.320.000	-	-	-	19.991.500	112.184.750	-	-	-	26,2%	96%	52%	461%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyusunan Perencanaan , Pemngelolaan dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	-	2.804.403.600	1.779.256.364	-	-	-	2.471.571.806	1.696.030.177	-	-	-	88,1%	95%	-37%	-31%
	Penyusunan dan Pelaporan Ketetalaksanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1.000.000	1.609.200	-	-	-	1.000.000	1.609.200	-	-	-	100,0%	100%	61%	61%
	Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-	500.000	622.700	-	-	-	500.000	622.500	-	-	-	100,0%	100%	25%	25%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.741.024	37.904.120	42.191.600	-	-	66.803.900	37.884.000	42.191.600	-	-	99%	100%	100%	-	-	-21%	-21%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.629.748	71.531.400	65.952.400	-	-	37.173.998	71.206.000	65.402.400	-	-	83%	100%	99%	-	-	22%	33%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	277.242.000	367.030.000	135.535.000	-	-	269.896.000	365.579.000	134.689.000	-	-	97%	100%	99%	-	-	-30%	-29%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	74.497.800	79.914.500	6.259.600	-	-	60.263.248	75.912.521	3.057.600	-	-	81%	95%	49%	-	-	-71%	-77%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.878.200	39.476.200	38.652.500	-	-	14.220.000	34.476.500	32.797.800	-	-	80%	87%	85%	-	-	47%	52%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	18.737.600	7.400.000	7.907.000	-	-	18.187.600	7.400.000	7.907.000	-	-	97%	100%	100%	-	-	-35%	-34%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	331.745.000	-	-	-	-	330.955.000	-	-	-	-	99,8%	-	-	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional	74.000.000	74.000.000	50.000.000	-		67.870.000	67.870.000	50.000.000	-		92%	92%	100%	-	-	-18%	-14%
	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	-	10.000.000	10.000.000	-		-	10.000.000	10.000.000	-			100%	100%	-	-	0	0
	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	-	-	-	83.000.000	21.175.000	-	-	-	82.500.000	20.500.000	-	-	-	99%	-	-74%	-75%
	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	-	-	-	9.500.000	70.120.000	-	-	-	9.155.000	67.070.200	-	-	-	96%	-	638%	633%
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	29.440.500	9.614.000	536.400	-		25.359.500	9.614.000	536.400	-	-	86%	100%	-	-	-	-87%	-85%
	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	-	10.000.000	2.299.400	-		-	9.802.000	2.299.400	-	-		98%	-	-	-	-77%	-77%
	Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1.250.000	1.245.200	-	-	-	1.250.000	1.245.000	-	-	-	100%	99,98 %	0%	0%
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		-															
	Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara	125.867.600	-	-	-	-	109.001.320	-	-	-	-	87%	-	-	-	-	0	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Reaalisasi
	Terpadu																	
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	648.990.110	-	-	-	-	489.322.908	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	0	0
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	2.295.000	-	-	-	-	2.295.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0	0
	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	199.940.250	-	-	-	-	196.064.869	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	0	0
	Pengembangan Database Kependudukan	46.766.050	-	-	-	-	42.487.850	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	0	0
	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	212.140.700	-	-	-	-	208.569.500	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	0	0
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	97.002.000	-	-	-	-	87.840.298	-	-	-	-	91%	-	-	-	-	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK																	
	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	-	322.788.000	-			-	319.694.920	-	-	-	-	99%	-	-	-	0	0
	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	192.925.100	201.513.000			-	185.006.000	191.392.000	-	-	-	96%	95,0%	-	-	4%	3%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Mobiling	-	404.262.200	636.450.500			-	372.999.094	548.702.722	-	-	-	92%	86,2%	-	-	57%	47%
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dokumen	-	8.450.000	7.250.000			-	3.639.000	3.263.500	-	-	-	43%	45,0%	-	-	-14%	-10%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Reaalisasi
	Pendaftaran Penduduk																	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	198.916.100	391.006.600			-	160.928.720	375.701.019	-	-	-	81%	96,1%	-	-	97%	133%
	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	-	-	-	245.470.000	144.793.600	-	-	-	193.029.200	130.666.400	-	-	-	78,6%	53,2%	-41%	-32%
	Pelayanan identitas Penduduk	-	-	-	324.412.154	344.348.304	-	-	-	305.283.000	317.486.300	-	-	-	94,1%	97,9%	6%	4%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	-	-	-	300.000.000	278.776.372	-	-	-	296.344.868	259.006.195	-	-	-	98,8%	86,3%	-7%	-13%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL																	
	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Pengesahan Dan Pengakuan Anak	-	55.825.800	81.866.200	57.016.700		-	53.818.420	80.895.478	53.976.100		-	96%	98,8%	94,7%	-		
	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan dan Perceraian	-	26.452.000	4.850.000	-		-	26.380.000	4.850.000	-		-	100%	100,0%		-	-82%	-82%
	Pengelolaan Arsip Akta Pencatatan Sipil	-	50.096.700	44.881.600	-		-	48.673.000	43.761.875	-		-	97%	97,5%		-	-10%	-10%
	Legalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil	-	10.000.400	8.123.300	-		-	8.394.200	7.883.500	-		-	84%	97,0%		-	-19%	-6%
	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian dan Perubahan Nama	-	-	-	57.016.700	71.652.200	-	-	-	53.976.100	59.429.700	-	-	-	94,7%	104,2%	26%	10%
	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinaan, Perceraian, Pengakuan Dan, Pengesahan	-	-	-	35.767.700	39.365.300	-	-	-	28.036.100	33.335.700	-	-	-	78,4%	93,2%	10%	19%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realiasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Dan Pengangkatan Anak																	
	Pelayanan Pencatatan Sipil (DAK)	-	-	-	100.000.000	99.999.000	-	-	-	95.948.917	99.842.641	-	-	-	95,9%	99,8%	0%	4%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																	
	Sosialisai Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)	-	142.300.000	-	-		-	141.975.000	-	-	-	-	99,8%	-	-	-	0	0
	Sosialisai Kebijakan Kependudukan	-	144.001.900	234.007.650	-		-	142.931.300	225.990.150	-	-	-	99%	96,6%	-	-	63%	58%
	Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	-	71.800.000	664.775.872	-		-	69.899.100	661.850.050	-	-	-	97%	99,6%	-	-	826%	847%
	Peningkatan Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	-	-	-	199.784.000	78.510.500	-	-	-	198.919.100	76.229.800	-	-	-	99,6%	91,7%	-61%	-36%
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	-	-	-	118.400.000	118.400.000	-	-	-	116.054.600	107.402.600	-	-	-	98,0%	90,7%	0%	-7%
	Pengelolaan Informasi Dan Data Kependudukan	-	-	-	306.491.200	594.039.500	-	-	-	304.389.900	590.704.400	-	-	-	99,3%	99,4%	94%	94%
	PROGRAM PROFILE KEPENDUDUKAN																	
	Penyusunan Profile Kependudukan Kota	-	90.997.100	123.704.700	-		-	90.640.604	123.088.140	-	-	-	100%	99,5%	-	-	36%	36%
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-	95.940.000	345.234.400	0	271.335.000	-	95.177.000	344.352.100	0	270.648.412	-	99%	99,7%	-	-	41%	42%

No	Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(DAK)																	
	Udating Data NIK Penduduk Tingkat RT/RW se Kota Blitar	-	24.879.000	107.250.000	-		-	24.228.400	105.025.200	-	-	-	97%	98%	-	-	331%	333%

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Dari tabel anggaran serta realisasi anggaran dapat terlihat capaian anggaran yang masih kurang pada periode renstra tahun 2016 – 2020 yaitu

1. Pada tahun pertama untuk kegiatan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operational dengan anggaran 6.259.600 terealisasi 3.057.600 dengan capaian realisasi 48,85%. Capaian masih rendah dikarenakan pada saat perencanaan penganggaran diberikan kelonggaran anggaran untuk mengantisipasi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Selain itu ada 3 motor yang belum dibayarkan pajak tahunannya hal ini dikarenakan masih kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana
2. Pada tahun kedua dan ketiga kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar 7.250.000 terealisasi 3.263.500 dengan capaian realisasi 45,01. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dikarenakan keterbatasan SDM.
3. Pada tahun keempat Kegiatan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dengan anggaran sebesar 245.470.000 terealisasi 193.029.200 dengan capaian realisasi 78,64%. Hal ini disebabkan selain adanya efiseinsi dari pengadaan brang/jasa juga dikarenakan untuk realisasi pengiriman paket dokumen adminduk kepada masyarakat target di DPA sebanyak 10.000 dokumen. Sedangkan relaisasi sesuai dengan permohonan pelayanan yang masuk hanya 6.125 dokumen dengan silpa anggaran sebesar 24.875.000

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Selain itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan memiliki kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan pengelolaan data Kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa Tantangan menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Pola pikir masyarakat dalam mensikapi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin kritis dan berasal dari berbagai kepentingan yang berbeda , serta semakin ketatnya kontrol masyarakat baik yang dilakukan secara langsung maupun lewat wakil – wakilnya diLegislatif.
- b. Menurunnya kadar kepercayaan kepada pemerintah oleh masyarakat harus disikapi dengan kerja keras serta bukti nyata , dengan terus menerus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi – inovasi pelayanan.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
- d. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam memberikan layanan adminduk adalah sebagai berikut :

- a) Kewenangan dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semakin kuat dan jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b) Sinergitas pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c) Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan;
- d) Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih efektif dan efisien;
- e) Data Kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Blitar dijadikan sumber utama data kependudukan dan menjadi rujukan semua instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat di wilayah Kota Blitar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis organisasi perangkat daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa 5 (lima) tahun mendatang.

3.1. 1identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar merupakan unsur pelayanan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan terutama yang berkaitan dengan aspek pokok kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan yang lebih mendekatkan pada masyarakat	Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan online
			Kurangnya perangkat ADM untuk memberikan layanan cetak

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			mandiri bagi masyarakat Kota Blitar
2	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya tata kelola arsip pencatatan sipil.	Belum adanya tenaga arsiparis dalam pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Belum optimalnya pengelolaan berkas/dokumen arsip pencatatan sipil
		Kurang update data perkembangan penduduk	Belum adanya pemadanan data terintegrasi dengan lembaga terkait

Sumber: Dispendukcapil, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar maka program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan program Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Penjelasan Visi dan Misi tersebut yaitu :

KOTA BLITAR KEREN : Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas Keberagaman tetap dalam kondisi RELigius dan Nasionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.

UNGGUL : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai-nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan menghadapi Revolusi Industri

MAKMUR : Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

BERMARTABAT : Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Adminduk.
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tersebut adalah pada misi 5 (lima) yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Intervensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah pada capaian indikator sasaran prosentase SKPD dengan survey kepuasan masyarakat bidang kependudukan dan pencatatan sipil Baik.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Belum optimalnya pelayanan yang lebih mendekatkan pada masyarakat	- Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan online - Kurangnya perangkat ADM untuk memberikan layanan cetak mandiri bagi masyarakat Kota Blitar	Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan sarana pendukung inovasi pelayanan (SIPAK Mandiri) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan adminduk secara daring serta mengoptimalkan sosialisasi terkait pelayanan adminduk daring melalui berbagai media yakni media sosial, elektronik dan media cetak

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Terjaminnya hak – hak keperdataan	Belum optimalnya kepemilikan dokumen	Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor	Belum optimalnya

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	setiap warga negara dalam aspek kependudukan dengan sasaran strategis: Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	kependudukan dan pencatatan sipil, yakni dokumen KIA dan Akte kelahiran seluruh warga Kota Blitar	79 tahun 2020 tentang penghentian sementara pengenaan denda administrasi atas laporan kependudukan dan pencatatan sipil sehingga akan mendorong warga diatas 18 tahun yang belum mempuntai akte kelahiran untuk segera mengurusnya.	sosilisasi kebijakan pelayanan adminduk kepada masyarakat
2.	Tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan sasaran jumlah Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan oleh Lembaga/OPD / Badan Hukum	Adanya kebutuhan data kependudukan dalam mempermudah pemberian layanan public sehingga mendorong Lembaga/OPD untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan Lembaga/OPD dalam pemanfaatan data kependudukan untuk layanan public

Selanjutnya Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk dengan sasaran strategis: Persentase Data Penduduk Yang akurat	Kurang update data perkembangan penduduk	Dengan adanya kerjasama dengan lintas sector/ OPD seperti PN, Kejaksaan, KUA melalui inovasi SIPAK Integrasi sehingga untuk perkembangan/ perubahan elemen data penduduk dapat terupdate	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan datanya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil penjaringan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). di bawah ini menunjukkan daftar permasalahan dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Blitar.

Tabel 3.5
Isu Strategis Kota Blitar

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Ekonomi	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perpajakan perlu perbaikan
		Perlu penataan PKL
		Dampak Negatif perkembangan kota
	Kondisi Infrastruktur Kota	kondisi Infrastruktur perlu ditingkatkan
	Pengembangan ekonomi Lokal	Pengembangan ekonomi belum maksimal
Lingkungan	Penurunan angka pengangguran	Penurunan angka pengangguran belum maksimal
	Kondisi Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan masih tinggi
		Perubahan Iklim
		Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
		Penurunan kuantitas sumberdaya air
		Ruang Terbuka Hijau Terbatas
		Belum tertatanya kawasan permukiman
		Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
		Daya dukung lingkungan menurun
	Bencana (Alam dan Non Alam)	Bencana
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
Sosial	Alih Fungsi Lahan	Alih Fungsi Lahan Pertanian
	Kemiskinan	Kemiskinan
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan
	Tingkat Kesehatan	Kesadaran hidup sehat

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
	Masyarakat	masyarakat masih rendah
		Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
	Tingkat Pendidikan	Perlunya Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan yang Adil dan Merata
Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Keterkaitan isu strategis KLHS RPJMD dengan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan dibidang kependudukan dan pencatatn sipil masuk dalam pilar tata kelola pada kelompok isu strategis reformasi birokrasi. Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Sasaran KLHS	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan KLHS	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kelahiran yang dialami	Adanya inovasi “PECEL BLITAR” Pelayanan Cepat Langsung , Bayi Lahir Ibu Terima Akta Lahir. Kerjasama antara Dukcapil dengan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran	Belum semua fasilitas keshatan / rumah sakit yang ada di Kota Blitar memanfaatkan inovasi “PECEL BLITAR”
a.	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil			
b.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang .

Mengacu pada serangkaian telaahan keterkaitan terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidupm Strategis serta kondisi organisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat ditentukan rumusan isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Isu strategis inilah yang akan dikedepankan dalam perencanaan 5 tahun mendatang sebagai upaya untuk :

1. Bisa memberikan pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat .

Berbagai upaya – upaya inovasi akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memberikan pelayan yang mudah bagi masyarakat. Sebagai implementasi dari amanat misi Walikota Bliitar yang ke lima yakni pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi. Dengan semboyan pelayanan yang membahagiakan masyarakat maka perlu untuk mengoptimalkan pelayanan online yang sudah ada agar pelayanan Adminduk online bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar. `

2. Peningkatan kepemilikan capaian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam hal ini khususnya untuk capaian dokumen kependudukan yang masih kurang yakni dokumen KIA serta dokumen Akta Kelahiran dari seluruh kelompok umur di Kota Blitar

3. Meningkatnya tata kelola arsip pencatatan sipil , mengingat arsip dokumen pencatatan sipil merupakan arsip yang sangat vital dan terus bertambah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga/OPD dalam pelayanan public. Yang mana pada saat ini masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data kependudukan. Untuk itu maka perlu untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Data kependudukan yang update sesuai peristiwa / perkembangan penduduk. Dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga/ OPD yang berkaitan dengan jenis elemen data penduduk untuk melakukan pemadanan data, sehingga data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat sesuai dengan peristiwa perkembangan penduduk .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan diacapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapi 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu -isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki

4.1.2 Sasaran.

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Publik dengan strategi Peningkatan kualitas sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menetapkan tujuan yaitu untuk menangani isu isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Jawa Timur. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 - 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026
A	TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil	84 (BAIK)	84,50 (BAIK)	85 (BAIK)	85,50 (BAIK)	86 (BAIK)
2	SASARAN 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pendaftaran penduduk}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	95%	96%	97%	98%	99%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil}}{4 \text{ dokumen}} \times 100$	95%	96%	97%	98%	99%
3	SASARAN 2: Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	51,7	58,6	65,5	72,4	79,3
B	TUJUAN 2: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)
1	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan upaya yang lebih rinci dari tiap strategi. Pada saat yang sama, perumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
MISI 5 :	MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga/ badan hukum	Peningkatan kualitas system pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Peningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan 2. Peningkatan kualitas data kependudukan 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan administrasi kependudukan 4. Peningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program , kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program , kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana table berikut .

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	85,35 (A)	85,85 (A)		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KOTA BLITAR
			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Hasil survey IKM layanan sekretariat di tahun berjalan	Nilai	83 (BAIK)	85 (BAIK)	5.157.603.124		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	100	19.171.200		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Dokumen	8	8	4.259.800		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	10	10	4.911.600		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ZI	Jumlah dokumen ZI pada tahun yang bersagkutan	Dokumen	1	1	9.999.800		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100	3.354.919.046		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan pada tahun bersangkutan	Orang	29	29	3.353.343.546		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	1	1.575.500		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	100	100	343.371.100		
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	even	2	2	343.371.100		
				Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan	pulikasi	2	2			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
				Jumlah boilboard sebagai sarana sosialisasi yang terpelihara		titik	13	13			
				Jumlah jenis publikasi media cetak		jenis	5	5			
				Jumlah peserta sosialisasi		orang	325	325			
				Jumlah publikasi di media elektronik		kali	2	2			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	%	100	100	601.480.530		
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	11	11	12.820.200		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan gedung Kantor yang tersedia	Jumlah jenis Peralatan gedung Kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	1	1	85.966.000		
				Jumlah jenis Perlengkapan gedung Kantor yang tersedia	Jumlah jenis Perlengkapan gedung Kantor yang tersedia	Jenis	1	1			
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	26	26	13.235.200		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	Dos	353	353	46.134.000		
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	29	29			
				Jumlah minuman tamu yang tersedia	Jumlah minuman tamu yang tersedia pada tahun bersangkutan	Dos	115	115			
				Jumlah jenis konsumsi penanganan / pencegahan COVID 19	Jumlah jenis konsumsi penanganan / pencegahan COVID 19 pada tahun bersangkutan	Jenis	2	2			
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Cetakan	6	6	13.281.400		
				Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun bersangkutan	Lembar	500000	500000			
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Bahan bacaan	2	2	6.120.000		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	Rapat	50	50	300.774.000		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang dikelola	Jumlah dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang dikelola pada tahun bersangkutan	Dokumen	325	325	123.149.730		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	%	100	100	596.803.733		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	1	1	1.000.000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	Rekening	5	5	361.803.733		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia pada tahun bersangkutan	orang	78	78	234.000.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml l Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	100	241.857.515		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada tahun bersangkutan	Unit	3	3	92.368.050		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
				Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	12	12			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	Unit	4	4	34.356.065		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara /terehab pada tahun bersangkutan	Unit	1	1	76.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Dsarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana pelengkap gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis sarana pelengkap gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	Unit	4	4	39.133.400		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan adminitrasi kependudukan	Hasil survey SKM di tahun berjalan	Nilai	86,66			Dispenduk Capil	Kota Blitar
		2. Meningkatnya kepemilikandokumen kependudukan dan pencatatan sipil		1. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / 3 dokumen x 100%	%	94,80				

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
				2. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil / 4 dokumen x 100%	%	99,25				
			1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	(Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP thn n dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n-1 x 100%)	%	0,48	0,03	161.459.008	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n x 100 %) - (Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n-1 dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiliki KIA pada tn n-1 x 100%)	%	0,48	2,55			
				3. Persentase penerbitan dokumen KK	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan permohonan KK x 100%	%	100,00	100,00			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KIA, KK)					120.536.008		
				- KTP	(Jumah Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	%	99,52	99,59			
				- KIA	(Jumah jumlah anak wajib KIA 0-16 tah yang memiliki KIA dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	%	79,70	84,80			
				-KK	(Jumlah permohonan KK yang masuk dibagi jumlah KK yang diterbitkan) x 100%	%	100,00	100,00			
			Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta pendataan penduduk rentan	Jumlah peserta pendataan penduduk rentan pada tahun bersangkutan	Orang	39	39	21.341.300		
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen yang dikirim	Jumlah dokumen yang dikirim pada tahun bersangkutan	Dokumen	7000	7000	99.194.708		
				Jumlah jenis cetakan yang tersedia	Jumlah jenis cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	4	4			
				Jumlah jenis peralatan perekaman KTP el yang terpelihara	Jumlah jenis peralatan perekaman KTP el yang terpelihara pada tahun bersangkutan	Jenis	3	3			
				Jumlah pelayanan keliling	Jumlah pelayanan keliling pada tahun bersangkutan	Pelayanan Keliling	50	50			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
				Jumlah jenis ATK pelayanan KTP el yang tersedia	Jumlah jenis ATK pelayanan KTP el yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	7	7			
			Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	Jumlah jenis blanko yang tersedia / jumlah jenis blanko yang dibutuhkan x 100%	%	100	100	37.620.000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah formulir/blanko pendaftaran penduduk yang tersedia	Jumlah formulir/blanko pendaftaran penduduk yang tersedia pada tahun bersangkutan	Formulir	20000	20000	37.620.000		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	(Jumlah kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah kecamatan / kelurahan se Kota Blitar) x 100%	%	100	100	3.303.000		
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di setiap kelurahan	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di setiap kelurahan pada tahun bersangkutan	Orang	50	50			
				Jumlah peserta rakor money pelayanan intern	Jumlah peserta rakor money pelayanan intern pada tahun bersangkutan	Orang	15	15			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n-1 dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n-1 x 100 %)	%	2,34	2,19	316.943.000	BIDANG PELAYANA N PENCATAT AN SIPIL	
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	(Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %)	%	3,36	2,6			
				3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Jumlah akte kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%	%	100	100			
				4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	(Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n- x 100%)	%	1,77	0,03			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran, kematian, perkawinan , perceraian)					86.548.900		
				- Akte kelahiran	(Jumah wajib Akta lahir yang memiliki akte kelahiran dibagi wajib akta lahir) x 100%	%	97,02	97,68			
				- Akte kematian	(Jumlah permohonan akta kelahiran yang masuk dibagi jumlahakta kelahiran yang diterbitkan) x 100%	%	100,00	100,00			
				- Akte perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	%	76,80	811,24			
				- Akte perceraian	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	%	74,39	79,59			
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen keabsahan yang dikirim	Jumlah dokumen keabsahan yang dikirim pada tahun bersangkutan	Dokumen	400	400	28.564.000		
				Jumlah peserta apat koordinasi pelayanan akta kelahiran kematian dengan ecamatan dan kelurahan	Jumlah peserta apat koordinasi pelayanan akta kelahiran kematian dengan kecamatan dan kelurahan pada tahun bersangkutan	Orang	34	34			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
				Jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan akta dengan KUA dan P3N Kecamatan	Jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan akta dengan KUA dan P3N Kecamatan pada tahun bersangkutan	Orang	120	120			
				jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan pencatatan sipi	jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan pencatatan sipi pada tahun bersangkutan	Orang	70	70			
			Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah data dokumen pencatatan sipil yang terkumpul	Jumlah data dokumen pencatatan sipil yang terkumpul pada tahun bersangkutan	Dokumen	4000	4000	35.939.900		
			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis formulir pencatatan sipil yang tersedia	Jumlah jenis formulir pencatatan sipil yang tersedia pada tahun bersangkutan	Jenis	9	9	32.045.000		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan / jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang di rencanakan x 100%	%	100	100	182.423.800		
			Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi bersama KUA dan modin se Kota Blitar	Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi bersama KUA dan modin se Kota Blitar pada tahun bersangkutan	Orang	30	30	4.932.000		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
				Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pencatatan perkawinan bersama P3N	Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pencatatan perkawinan bersama P3N pada tahun bersangkutan	Orang	7	7			
			Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah alat komunikasi pendukung pelayanan keliling pencatatan sipil yang tersedia	Jumlah alat komunikasi pendukung pelayanan keliling pencatatan sipil yang tersedia pada tahun bersangkutan	Unit	0	3	58.622.000		
				Jumlah pelayanan keliling pencatatan sipil (sasaran usia diatas 18 tahun)	Jumlah pelayanan keliling pencatatan sipil (sasaran usia diatas 18 tahun) pada tahun bersangkutan	Pelayanan Keliling	48	48			
				Jumlah anggota tim lintas sektor yang terfasilitas	Jumlah anggota tim lintas sektor yang terfasilitas dalam tahun yang bersangkutan	Orang	58	58			
			Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	jumlah peserta pencatatan perkawinan massal non muslim	jumlah peserta pencatatan perkawinan massal non muslim pada tahun bersangkutan	Orang	20	20	133.440.900		
			Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan pencatatan sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan pencatatan sipil pada tahun bersangkutan	Orang	195	195	24.804.300		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	(Jumlah petugas pelayanan yang dibina dibagi jumlah seluruh tenaga pelayanan) x 100%	%	0	100	47.970.300		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta pembinaan dan bimbingan teknis pencatatan sipil	Jumlah peserta pembinaan dan bimbingan teknis pencatatan sipil pada tahun bersangkutan	Orang	0	70	47.973.900		
		3. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukdan oleh OPD/lembaga/ badan hukum		Persentase jumlah Perangkat Daerah/lembaga/badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS dibagi jumlah OPD (29) x 100%	%	0,27	51,7		BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada th n dikurangi Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada tahun (n-1)dibagi jumlah Jumlah elemen target yang dimutakhirkan. X 100%	%	NA	16	744.008.200		
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	(Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan dibagi jumlah OPD yang diusulkan PKS) x 100%	%	100	100	5.100.000		
			Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah peserta rapat PKS	Jumlah peserta rapat PKS pada tahun bersangkutan	Orang		40	5.100.000		
				Jumlah PKS yang dievaluasi	Jumlah PKS yang dievaluasi pada tahun bersangkutan	PKS		13			
				Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan penyusunan PKS	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan penyusunan PKS pada tahun bersangkutan	OPD		3			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan / kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di rencanakan x 100%	%	NA	100	266.564.200		
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah aplikasi pengaduan yang ter update	Jumlah aplikasi pengaduan yang ter update pada tahun bersangkutan	Aplikasi	1	1	266.564.200		
				Jumlah dokumen IKM yang tersedia	Jumlah dokumen IKM yang tersedia pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	1			
				Jumlah dokumen SPP yang dievaluasi	Jumlah dokumen SPP yang dievaluasi pada tahun bersangkutan	Dokumen	1 dok	1 dok			
				Jumlah SOP yang dievaluasi	Jumlah SOP yang dievaluasi pada tahun bersangkutan	SOP	34	34			
				Jumlah surveylance ISO	Jumlah surveylance ISO pada tahun bersangkutan	kali	1	1			
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	Jumlha Elemen data yang diupdate tahun n/ keseluruhan jumlah elemen data x 100%	%	NA	100	472.344.000		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis peralatan Pengelolaan Informasi Adminsitrase Kependudukan yang tersedia	Jumlah jenis peralatan Pengelolaan Informasi Adminsitrase Kependudukan yang tersedia pada tahun bersangkutan	Unit	8	8	472.344.000		
				Jumlah jenis peralatan pengelolaan data dan pelayanan yang terpelihara	Jumlah jenis peralatan pengelolaan data dan pelayanan yang terpelihara pada tahun bersangkutan	Unit	3	3			
				Jumlah Jenis Update Perkembangan Data Kependudukan	Jumlah Jenis Update Perkembangan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Unit	2	2			
				Jumlah peserta Rapat Teknis Operator SIAK dan SIPAK	Jumlah peserta Rapat Teknis Operator SIAK dan SIPAK pada tahun bersangkutan	Orang	100	100			
				Jumlah peserta monev implmentasi aplikasi SIPAK DAN SIAK	Jumlah peserta monev implmentasi aplikasi SIPAK DAN SIAK pada tahun bersangkutan	Orang	40	40			
				Jumlah rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun bersangkutan	Orang	40	40			
				Jumlah peserta rapat pepadanan data /informasi	Jumlah peserta rapat pepadanan data /informasi pada tahun bersangkutan	Orang	200	200			
			2. PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	Jumlah Buku Profil yang tersedia / Jumlah Buku profil yang Harus disajikan x 100%	%	100	100	84.980.000	SEKRETARIAT	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022			
1	2	4		5				K	Rp	8	9
			Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan sesuai standart/ Jumlah Buku profil yang Harus diterbitkan dan sesuai standart x 100%	%	100	100	84.980.000		
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan pada tahun bersangkutan	Buku	200	200	84.980.000		

Tabel. 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
1	2	4		5				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	85,35 (A)	85,85 (A)		86,35 (A)		86,85 (A)		87,35 (A)		87,35 (A)		SEKRETARIAT	KOTA BLITAR
			5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	Hasil survey IKM layanan sekretariat di tahun berjalan	indeks	83 (BAIK)	86 (BAIK)	5.203.901.558	87 (BAIK)	5.391.514.342	88 (BAIK)	5.746.971.612	89 (BAIK)	5.918.311.289	89 (BAIK)	22.260.698.801		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	%	100	100	9.912.630	100	10.408.339	100	10.928.674	100	11.475.100	100	42.724.743		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	8	8	4.755.450	8	4.993.300	8	5.242.883	8	5.505.100	32	20.496.733		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	10	10	5.157.180	10	5.415.039	10	5.685.791	10	5.970.000	40	22.228.010		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100	3.642.329.520	100	3.824.445.986	100	4.014.844.540	100	4.216.451.800	100	15.698.071.846		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	Orang	27	28	3.640.675.320	27	3.822.709.086	27	4.013.844.540	27	4.214.536.800	108	15.691.765.746		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	1	1	1.654.200	1	1.736.900	1	1.000.000	1	1.915.000	4	6.306.100		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
				Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD															
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar <i>daerah yang sesuai standar</i>	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar <i>/Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%</i>	%	100	100	62.762.700	100	65.900.835	100	66.000.000	100	76.288.454	100	270.951.989		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun bersangkutan	Paket	2	2	25.029.120	2	25.029.120	2	25.029.120	2	25.029.120	8	100.116.480		
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun bersangkutan	Orang	38	38	62.762.700	38	65.900.835	38	66.000.000	38	76.288.454	38	270.951.989		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia <i>/Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%</i>	%	100	100	575.379.768	100	594.741.294	100	780.304.529	100	755.219.779	100	2.705.645.370		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	1	1	13.461.000	1	14.134.100	1	14.840.800	1	15.582.800	4	58.018.700		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	1	2	40.000.000	2	41.000.000	2	42.000.000	2	43.000.000	8	166.000.000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	3	3	13.896.900	3	14.591.800	3	15.321.390	3	16.087.500	12	59.897.590		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	2	159.347.012	2	165.062.171	2	173.315.279	2	181.981.043	8	679.705.505		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	2	13.945.500	2	14.642.800	2	15.374.900	2	16.143.700	8	60.106.900		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Dokumen	24	24	6.426.000	24	6.747.300	24	7.084.600	24	7.438.800	96	27.696.700		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	30	30	205.153.356	30	215.413.123	30	256.183.780	30	237.492.968	120	914.243.227		
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	1	123.150.000	1	123.150.000	1	256.183.780	1	237.492.968	1	739.976.748		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	%	100	100	145.000.000	100	170.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	560.000.000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	NA	1	35.000.000							1	35.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2			2	60.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	4	85.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	unit	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	4	240.000.000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan <i>sesuai standar</i>	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan <i>penunjang urusan pemerintahan x 100%</i>	%	100	100	438.393.900	100	457.388.600	100	477.333.069	100	446.937.356	100	1.820.052.925		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Laporan	12	12	379.893.900	12	398.888.600	12	418.833.069	12	388.437.356	48	1.586.052.925		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Laporan	13	13	58.500.000	13	58.500.000	13	58.500.000	13	58.500.000	52	234.000.000		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jml l Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	%	100	100	330.123.040	100	268.629.288	100	277.560.800	100	286.938.800	100	1.163.251.928		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	3	3	101.842.900	3	106.935.088	3	112.281.800	3	117.895.900	12	438.955.688		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam tahun bersangkutan	Unit	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	4	4	27.121.400	4	28.477.500	4	29.901.400	4	31.396.500	16	116.896.800		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	1	1	150.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	390.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Dsarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	1	1	41.158.740	1	43.216.700	1	45.377.600	1	47646400	4	177.399.440		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan adminitrasi kependudukan	Hasil survey SKM di tahun berjalan	indeks	86,66	84		84,50		85		85,50		85,50			
		1. Meningkatnya kepemilikand okumen kependuduka n dan pencatatan sipil		1. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / 3 dokumen x 100%	%	94,80	95		96		97		98		98			
				2. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatn sipil / 4 dokumen x 100%	%	99,25	95		96		97		98		98			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								2023		2024		2025		2026					
			1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	(Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n-1 x 100%)	%	0,48	0,03	410.645,089	0,03	431.177,343	0,03	450.475,522	0,03	470.738,328	2,55	1.763.036,283	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	(Jumlah anak usia 0-17 1 hari yang memiliki KIA dibagi jumlah anak usia kurang 1 hari yang wajib KIA pada tn n x 100 %) anak usia 0-17 tahun ku yang memiliki KIA di tn jumlah anak usia 0-17 t 1 hari yang wajib memi tn n-1 x 100%)	%	0,00	2,55		2,55		2,55		2,55		2,55			
				3. Persentase penerbitan dokumen KK	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan permohonan KK x 100%	%	100	100		100		100		100		100			
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KIA, KK)					348.969,089		366.417,543		382.477,732		399.340,528		1.497.204,893		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
				- KTP	(Jumah Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	%	99,52	99,62		99,65		99,68		99,71		99,71			
				- KIA	(Jumah jumlah anak wajib KIA 0-16 tah yang memiliki KIA dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	%	79,70	87,35		89,90		92,45		95,00		95,00			
				-KK	(Jumlah permohonan KK yang masuk dibagi jumlah KK yang diterbitkan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100			
			Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	dokumen	1	1	22.408.365	1	23.528.783	1	24.705.222	1	25.940.078	4	96.582.449		
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	dokumen	1	1	326.560.724	1	342.888.760	1	357.772.510	1	373.400.450	4	1.400.622.444		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	Jumlah jenis blanko yang tersedia / jumlah jenis blanko yang dibutuhkan x 100%	%	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	215.506.250		
			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	dokumen	20000	20000	50.000.000	20000	52.500.000	20000	55.125.000	20000	57.881.250	80000	215.506.250		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	(Jumlah kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah kecamatan / kelurahan se Kota Blitar) x 100%	%	100	100	11.676.000	100	12.259.800	100	12.872.790	100	13.516.550	100	50.325.140		
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk pada tahun bersangkutan	laporan	1	1	11.676.000	1	12.259.800	1	12.872.790	1	13.516.550	4	50.325.140		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	(Jumlah pasangan men memiliki akte perkawin dibagi jumlah pasangan pada thn n x 100 %) - pasangan menikah yang akte perkawinan di tn n jumlah pasangan menil n-1 x 100 %)	%	2,34	2,19	403.092.700	2,19	356.698.980	2,19	619.708.920	2,19	438.748.101	2,19	1.818.248.701	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	(Jumlah pasangan cera memiliki akte perceraia jumlah pasangan yang thn n x 100 %) - (J pasangan cera yang m perceraian di tn dibagi pasangan yang cera pa 100 %)	%	3,36	2,60		2,60		2,60		2,60		2,60			
				3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Jumlah akte kematian y diterbitkan dibagi juml kematian yang dilapork	%	100	100		100		100		100		100			
				4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran		%	1,77	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
					(Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n- x 100%)														
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil <i>(akte kalhiran, kematian, perkawinan , perceraian)</i>					65.041.260			56.044.486		75.488.672		72.710.314			
				- Akte kelahiran	(Jumah wajib Akta lahir yang memiliki akte kelahiran <i>dibagi wajib akta lahir) x 100%</i>	%	97,02	98,01		98,34		98,67		99		99			
				- Akte kematian	(Jumlah permohonan akta kelahiran yang masuk dibagi jumlahakta <i>kelahiran yang diterbitkan) x 100%</i>	%	100	100		100		100		100		100			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
				- Akte perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di <i>dibagi jumlah pasangan menikah</i>) x 100 %	%	76,8	83,43		85,62		87,81		90		90			
				- Akte perceraian	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di <i>dibagi jumlah pasangan menikah</i>) x 100 %	%	74,39	82,19		84,79		87,39		89,99		89,99			
			Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting pada tahun bersangkutan	dokumen	1	1	35.824.980	1	31.491.811	1	41.387.387	1	45.641.014	4	154.345.192		
			Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	dokumen	9	9	29.216.280	9	24.552.675	9	34.101.285	9	27.069.300	9	114.939.540		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraa n pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatn sipil yang dilaksanakan / jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatn sipil yang di rencanakan x 100%	%	100	100	199.151.440	100	227.842.624	100	248.620.248	100	262.387.743	100	938.002.055		
			Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam pada tahun bersangkutan	laporan	1	1	13.832.780	1	8.400.000	1	17.140.985	1	20.182.293	4	59.556.058		
			Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	laporan	1	1	67.385.880	1	64.630.755	1	76.183.278	1	71.255.407	4	279.455.320		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
				Sipil															
			Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	laporan	1	1	92.100.000	1	123.311.869	1	122.220.985	1	125.300.000	4	462.932.854		
			Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	25.832.780	1	31.500.000	1	33.075.000	1	45.650.043	4	136.057.823		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	(Jumlah petugas pelayanan yang dibina dibagi jumlah seluruh tenaga pelayanan) x 100%	%	100	100	138.900.000	100	72.811.870	100	295.600.000	100	103.650.044	100	610.961.914		
			Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	Laporan	1	1	138.900.000	1	72.811.870	1	295.600.000	1	103.650.044	4	610.961.914		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
		2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukd an oleh OPD/lembaga / badan hukum		Persentase jumlah Perangkat Daerah/lembag a/ badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS dibagi jumlah OPD (29) x 100%	%	0,27%	58,6		65,5		72,4		72,4		72,4		BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	
			3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada th n dikurangi Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada tahun (n-1)dibagi jumlah Jumlah elemen target yang dimutakhirkan. X 100%	%	NA	16	800.742.510	16	873.235.031	16	916.896.792	16	961.689.982	64	3.552.564.315		
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan <i>Penyajian Database Kependudukan</i>	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan <i>yang diterbitkan</i>	(Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan dibagi jumlah OPD yang diusulkan PKS) x 100%	%	100	100	255.811.690	100	256.196.000	100	267.536.000	100	273.000.000	100	1.052.543.690		
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	1	249.615.690	1	250.000.000	1	260.000.000	1	264.000.000	4	1.023.615.690		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Dokumen	13	3	6.196.000	3	6.196.000	3	7.536.000	3	9.000.000	12	28.928.000		
			Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan penataan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan / kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di rencanakan x 100%	%	NA	100	293.887.000	100	294.000.000	100	295.000.000	100	350.000.000	100	1.232.887.000		
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraa n Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun pada tahun bersangkutan	Dokumen		1	293.887.000	1	294.000.000	1	295.000.000	1	350.000.000	4	1.232.887.000		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026					
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	Jumlha Elemen data yang diupdate tahun n/ keseluruhan jumlah elemen data x 100%	%	NA	100	142.000.000	100	212.000.000	100	214.896.792	100	226.000.000	100	794.896.792		
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1	69.000.000	1	70.000.000	1	71.896.792	1	76.000.000	4	286.896.792		
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	Laporan		1	73.000.000	1	142.000.000	1	143.000.000	1	150.000.000	4	508.000.000		
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	(Jumlah operator SIAK yang dibina dibagi jumlah seluruh operator SIAK) x 100%	%	100	100	109.043.820	100	111.039.031	100	139.464.000	100	112.689.982	100	472.236.833		
			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	Laporan	1	1	58.079.086	1	60.074.297	1	78.500.000	1	60.689.982	4	257.343.365		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi operasional / Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
								2023		2024		2025		2026												
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	Laporan	1	1		1	50.964.734		1	50.964.734		1	60.964.000		1	52.000.000		4		214.893.468		
			4. PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	Jumlah Buku Profil yang tersedia / Jumlah Buku profil yang Harus disajikan x 100%	%	100	100	89.229.000	100	93.690.450	100	98.374.900	100	103.293.700	100	384.588.050									
			Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan sesuai standart/ Jumlah Buku profil yang Harus diterbitkan dan sesuai standart x 100%	%	100	100	89.229.000	100	93.690.450	100	98.374.900	100	103.293.700	100	384.588.050									
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain pada tahun bersangkutan	Dokumen	200	200	89.229.000	200	93.690.450	200	98.374.900	200	103.293.700	800	384.588.050									

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Adapun Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Dispendukcapil Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Pereode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Sasaran RPJMD (Meningkatnya kualitas pelayanan public)							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,39	83	83,5	84,00	84,50	85,00	85,00
B.	Tujuan Renstra (Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil)							
	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		84 (BAIK)	84,50 (BAIK)	85 (BAIK)	85,50 (BAIK)	86 (BAIK)	86 (BAIK)
C.	Sasaran Renstra 1 (Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk)							
	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk		95%	96%	97%	98%	99%	99%
	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil		95%	96%	97%	98%	99%	99%
	Sasaran Renstra 2 (Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum)							
	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan		51,7	58,6	65,5	72,4	79,3	79,3
D	Indeks Keberhasilan Kunci (IKK)							
	Perekaman KTP Elektronik	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	80,22	82,77	85,32	87,87	90,42	92,97	92,97

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Pereode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kepemilikan Akta Kelahiran	95,43	95,76	96,09	96,42	96,75	97,08	97,08
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	13	2	2	2	2	2	23
B	Program							
1	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan <i>Indikator :</i> <i>Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan</i>	NA	16%	16%	16%	16%	16%	80%
2	Program pengelolaan profil kependudukan <i>Indikator:</i> <i>Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standar</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program pendaftaran penduduk <i>Indikator :</i> 1. <i>Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP</i>	0,48%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,15%
	2. <i>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA</i>	0,48%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12,75%
	3. <i>Persentase penerbitan dokumen KK</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Pencatatan Sipil <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan</i>	2,34%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	10,95%
	2. <i>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan</i>	3,36%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	13%
	3. <i>Persentase penerbitan dokumen akta kematian</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. <i>Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran</i>	1,77%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,15%

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022- 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026
1	SASARAN 1: Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependuudkan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pendaftaran penduduk}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	95%	96%	97%	98%	99%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil}}{4 \text{ dokumen}} \times 100$	95%	96%	97%	98%	99%
2	SASARAN 2: Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	51,7	58,6	65,5	72,4	79,3
3	SASARAN 3: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam

pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar maka dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar. Untuk itu agar melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.